

ANALISIS NASIONALISME NELAYAN INDONESIA DI KAPAL MALAYSIA DALAM PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA

THE ANALYSIS OF INDONESIAN FISHERMAN NATIONALISM IN MALAYSIAN VESSELS ON ILLEGAL FISHING IN INDONESIAN WATERS

Riandi Yudha Gunawan¹

Universitas Pertahanan
(yudha.riandi2014@gmail.com)

Abstrak - Dunia keamanan maritim saat ini tidak hanya membahas konsep pertahanan di laut dari ancaman militer asing saja, melainkan sudah membahas berbagai ancaman non militer salah satunya penangkapan ikan secara ilegal. Saat ini tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh kapal ikan asing dengan anak buah kapal asing saja, tetapi kali ini muncul fenomena kapal ikan asing menggunakan anak buah kapal asal Indonesia lalu melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan di perairan Indonesia. Beberapa kali terjadi penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia dengan anak buah kapal asal Indonesia sejak pertengahan Tahun 2015. Maraknya keterlibatan nelayan Indonesia dalam kejahatan tersebut selain karena faktor ekonomi juga mengindikasikan lunturnya rasa nasionalisme mereka sehingga diperlukan peran Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengeksplorasi dan memahami masalah dari sejumlah atau sekelompok orang dari data primer dan data sekunder yang didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata anak buah kapal yang bekerja di kapal ikan Malaysia berasal dari daerah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Penyebab mereka melakukan pencurian ikan di negaranya sendiri lalu membawanya ke Malaysia, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wawasan Nusantara dan Nasionalisme, namun para anak buah kapal tersebut masih memiliki semangat nasionalisme yang baik bahkan mereka siap membela negaranya bila dibutuhkan untuk berperang. Sedangkan kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Daerah masih bersifat membantu perekonomian nelayan saja, seperti Program Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, Bantuan Perlengkapan Budidaya Apung, Sosialisasi Pemanfaatan Daerah Pesisir dan Pembinaan Pengoperasian Alat Tangkap Ramah Lingkungan.

Kata kunci: Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Kapal Ikan Malaysia, Anak Buah Kapal, Nasionalisme.

Abstract - The world of maritime security today is not only discussing the concept of defense at sea from foreign military threats, but also discussing various non-military threats such as illegal fishing. Currently illegal fishing theft is not only conducted by foreign fishing vessels with their foreign crew, in several occasion, there are rising phenomenon where foreign fishing vessels using Indonesian crew to commit a criminal act of fishery in Indonesia. Since mid 2015, several incidents have been recorded, explaining the capture of Malaysian flagship with Indonesian crew. The rise of Indonesian fishermen involvement in this kind of crime, aside from economic factors, also indicates dissipation of their nationalism. Based on that, there is a need to see the role of Central and Regional Government to solve the problem. This thesis is using qualitative research as the methodology by exploring and

¹ Riandi Yudha Gunawan, S.IP., M.Si (Han), adalah lulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, Program Studi Keamanan Maritim.

trying to understand the problems from a number of group of people perspectives as the primary sources and also data from the secondary that have been obtained. The results shown that the average crew working in Malaysian fishing boats were coming from North Sumatra, Riau Islands, West Borneo, South Celebes and Southeast Celebes. The act of crime conducted by Indonesian crew on the foreign vessels caused by a lack of understanding on nationalism and Nusantara insight, in the other side, the crew were still uphold the spirit of nationalism and ready to defend the whenever needed. However, the policies and programs created by Central and Regional Government were still focusing and assisting the fishermen's economy, such as Fishing Facility Aid Program, Aquaculture Equipment Aid, Coastal Use Utilization and Development of Eco-Friendly Equipment Operation.

Keywords: Illegal Fishing, Malaysia's Fishing Vessels, The Crews, Nationalism.

Pendahuluan

Modus operandi *illegal fishing* dapat digolongkan sebagai kejahatan ekonomi karena: pertama, pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha sukses; ketiga, tindak pidana ini memerlukan penanganan dan pengendalian secara khusus dari aparaturnya penegak hukum pada umumnya.²

Senada dengan hal diatas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan (Ditjen PSDKP KKP) mengungkapkan dalam Seminar Maritim Seskoal 2016, bahwa kejahatan *Illegal fishing* memerlukan penanganan khusus karena berpotensi sebagai *transnational*

organized crime, karena melibatkan pelaku/mafia dari dalam dan luar negeri.

Ancaman keamanan diatas disebabkan oleh aktor-aktor internasional non negara dimana perkembangan fenomena globalisasi telah menggeser kedaulatan suatu Negara.³ Saat ini tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia tidak hanya dilakukan dengan Kapal Ikan Asing (KIA) yang memiliki Anak Buah Kapal (ABK) asing saja, tetapi kali ini muncul fenomena KIA menggunakan ABK asal Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, hingga saat ini masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai ABK pada KIA yang belum terdaftar atau bekerja secara ilegal. Menteri menjelaskan, dari 210 ribu orang

² Lewerissa, Yanti A., (2010). *Praktek Illegal Fishing di Perairan Mlauku sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Sasi Volume 16 Nomor 3. hlm. 62.

³ Ikhtiari, Richarunia W., (2011). *Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010*. Jakarta. Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. hlm. 3

warga Indonesia yang bekerja sebagai ABK di negara lain, sekitar setengahnya (40-50%) belum terdaftar sebagai tenaga kerja resmi di negara tempatnya bekerja.⁴

Fenomena maraknya penangkapan Kapal Ikan Malaysia yang menggunakan ABK asal Indonesia lalu menangkap ikan secara ilegal di Perairan Indonesia berawal pada tahun 2015, dimana pada tahun ini sudah dua kali penangkapan KIA oleh PSDKP KKP Batam di Perairan Indonesia berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala PSDKP Batam Akhmadon. Pertama, penangkapan Empat KIA berbendera Malaysia di Selat Malaka pada tanggal 18 Desember 2015 dengan 18 ABK yang juga WNI.⁵ Selanjutnya penangkapan kepada tiga kapal ikan berbendera Malaysia pada tanggal 10 Februari 2016 di wilayah Batam dengan dua puluh sembilan orang ABK dan tujuh orang Nahkoda kapal dimana semuanya berwarga negara Indonesia.⁶

⁴ Liputan 6 Bisnis, (2015 Nopember 30). *50% ABK RI Bekerja Secara Ilegal di Kapal Asing*. <http://bisnis.liputan6.com/read/2378160/50-abk-ri-bekerja-secara-ilegal-di-kapal-asing>, diakses pada 27 Desember 2015.

⁵ Sindonews, (2015 Desember 22). *Pekerjakan ABK Indonesia 4 Kapal Malaysia Mencuri Ikan di Malaka*. <http://daerah.sindonews.com/read/1071556/194/pekerjaan-abk-indonesia-4-kapal-malaysia-mencuri-ikan-di-malaka-1450783298>, diakses pada 27 Desember 2015.

⁶ PSDKP Batam, (2016). *Data Tindak Pidana Perikanan Tahun 2016 Di Satker PSDKP Batam*.

Selain itu terjadi penangkapan oleh jajaran Komando Armada Kawasan Timur (Koarmatim) KRI Ki Hajar Dewantara 364 kepada sebuah KIA berbendera Malaysia oleh TNI-AL pada tanggal 7 Juli 2015 di Perairan Ambalat Kalimantan Timur dengan 5 ABK yang merupakan WNI.⁷ Adapun kriteria pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal oleh Kapal Ikan berbendera Malaysia tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Maraknya keterlibatan nelayan Indonesia dalam kejahatan tersebut merupakan indikasi dari lunturnya rasa nasionalisme. Bila dilihat dari pernyataan Boyd Shafer (2012) “nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan demi bangsa itu sendiri”, maka individu yang disebut nelayan Indonesia tersebut telah memilih hidup untuk dan demi bangsa Malaysia walaupun harus melakukan kejahatan di negaranya sendiri.

Lebih lanjut Hans Kohn⁸ menyatakan “esensi nasionalisme adalah sikap mental, dimana kesetiaan tertinggi

⁷ Liputan 6 News, (2015 Juli 7). *TNI AL Tangkap Kapal Ikan Malaysia di Wilayah Sengketa Ambalat*. <http://news.liputan6.com/read/2267926/tni-al-tangkap-kapal-ikan-malaysia-di-wilayah-sengketa-ambalat>, diakses pada 14 Desember 2015.

⁸ Adisusilo, Sutarjo., (2010). *Nasionalisme Demokrasi Civil Society*. Universitas Sanata Dharma-Yogyakarta. hlm. 6.

diserahkan kepada negara bangsa". Maksud Hans Kohn ini sangat jelas bahwasanya sikap mental dan kesetiaan nelayan-nelayan tersebut terhadap negara Indonesia telah luntur karena secara sadar melanggar aturan yang negara tetapkan di bidang perikanan.

Dengan munculnya fenomena maraknya nelayan Indonesia yang bekerja sebagai ABK di Kapal Ikan Malaysia disertai dengan melakukan kejahatan *illegal fishing* di negaranya sendiri, menunjukkan saat ini Pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan *illegal fishing* yang cukup kompleks. Rasa cinta tanah air menjadi sesuatu yang dilupakan oleh nelayan Indonesia demi memperoleh kesejahteraan, untuk itulah dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan memiliki laut yang luas masih memiliki banyak pekerjaan rumah agar dapat berjaya di laut.

Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori dan konsep atau pendapat para ahli yang berkorelasi dengan objek yang dikaji oleh penulis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada teori dan konsep, yaitu teori keamanan maritim,

konsep nasionalisme, konsep kesadaran maritim dan konsep *illegal fishing*. Peneliti akan menerapkan teori dan konsep yang telah ada dengan data-data yang ditemukan lalu dilakukan analisis. Berikut ini adalah penjelasan keterkaitannya :

1. Teori Keamanan Maritim sebagai teori dasar dalam penelitian ini, peneliti akan mencari penyebab terjadinya dan menjelaskan dampak-dampak ancaman dari fenomena yang terjadi dengan mencari solusi penanganannya;
2. Konsep *Illegal Fishing*, peneliti akan menjelaskan bentuk kejahatannya dan pelanggarannya berdasarkan konsep yang sudah ada. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru menyimpang;
3. Teori Interaksional Simbolik, peneliti akan menjelaskan pengaruh lingkungan sekitar dalam membentuk kepribadian seseorang sehingga mempengaruhi sikap dan perilakunya. Peneliti juga menjelaskan pemahanan dan pengaruh simbol-simbol negara pada diri ABK;
4. Konsep Nasionalisme, peneliti akan menjelaskan bagaimana pengetahuan dan pemahaman para

ABK tentang wawasan kebangsaan serta bagaimana dengan sikap dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami yang oleh sejumlah atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif.⁹

Bentuk penelitian ini menerapkan cara pandang penelitian bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.¹⁰

Subjek dalam penelitian ini adalah narasumber yang menjadi sumber data primer. Narasumber-narasumber tersebut dipilih dari nelayan Indonesia yang pernah bekerja sebagai ABK di kapal Malaysia baik yang pernah maupun yang tidak pernah melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia dan beberapa

instansi yang memiliki hubungan erat dengan penanganan permasalahan nelayan Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera Malaysia tersebut.

Berikut ini adalah narasumber-narasumber yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

- a. WNI mantan ABK kapal ikan Malaysia asal Desa Numana, Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara (8 orang).
- b. Tokoh Masyarakat Nelayan Desa Numana, Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara (1 orang).
- c. Pejabat Pengawas Perikanan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS) PSDKP-KKP Batam.
- d. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kota Batam dan Pejabat Pengawas Perikanan PPNS Dinas KP2K (Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan) Kota Batam.
- e. Kepala Bidang Tata Penyelenggaraan Pendidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Jakarta.

⁹ Creswell, John W., (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar-Yogyakarta. hlm. 4.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 5.

Pembahasan

Penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia dengan ABK warga negara Indonesia di Perairan Indonesia saat ini masih saja berlangsung bahkan kali ini melibatkan perusahaan perikanan Malaysia. Penangkapan tersebut dilakukan oleh jajaran TNI Angkatan Laut Lantamal XII Pontianak di Perairan Tanjung Datuk, Sambas pada tanggal 18 September 2016 dengan hasil tangkapan berupa kapal ikan berbendera Malaysia asal Kuching, Serawak yang berukuran 67,5 GT dan berisi enam ABK yang semuanya berkewarganegaraan Indonesia.¹¹

Fenomena di atas terus saja terjadi walaupun penegakan hukum perikanan Indonesia saat ini sudah cukup memberikan efek jera yakni dengan penenggelaman kapal yang sudah dinyatakan bersalah di pengadilan (*incraht*). Bahkan Menteri KKP Susi Pujiastuti pada *World Ocean Summit* (WOS) 2017 yang diadakan di Bali mengajak PBB dan Uni Eropa untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan *illegal*

fishing yang diterapkan di Indonesia sekarang (Mongabay, 2017).

Sepanjang tahun 2016 kasus penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia dengan menggunakan ABK atau pun nakhoda asal Indonesia justru meningkat dari tahun 2015, seperti sudah tidak ada lagi pekerjaan lain yang harus dikerjakan para pemuda Indonesia sebagai ABK di kapal ikan Malaysia dengan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di negaranya sendiri.

ABK-ABK tersebut selain tidak dapat bersaing dengan nelayan lokal lainnya yang memiliki kapal besar dalam menangkap ikan di Perairan Indonesia sendiri, ada beberapa faktor penyebab sehingga mereka tidak bisa menahan diri mencari pekerjaan di Malaysia sebagai berikut :

1. Adanya sindikat pencari kerja ilegal dari Malaysia yang selalu siap menampung bahkan membawanya langsung dari daerah asal ABK tersebut dan didaftarkan di Departemen Pertanian Malaysia oleh pengusaha/pemilik kapal. Menurut Seivo Grevo Wewengkang, Pejabat Pengawas Perikanan PPNS PSDKP Batam melalui komunikasi personal (Batam-Kepulauan Riau, 19 Desember 2016) ia berpendapat :

¹¹ Kompas, (2016 September 20). *Kapal Ikan Malaysia Ditangkap di Perairan Tanjung Datuk*. <http://regional.kompas.com/read/2016/09/20/15152481/kapal.ikan.malaysia.ditangkap.di.Perairan.tanjung.datuk>, diakses pada 23 Maret 2017.

Mereka disanakan yang namanya masuk ilegal itu ada sindikatnya, sudah ada sindikat pasti pak. Misal saya punya kapal membutuhkan ABK sekian-sekian, jadi dipekerjakanlah orang-orang ini, karena kalo dari segi biayakan, kalau kita gak pakai kalau gak didaftarkan orang ini kan murah, karenakan di Malaysia ada pajaknya juga untuk penggunaan tenaga kerjanya, nanti disitu ada yang namanya penggunaan tenaga kerja yang dikeluarkan sama departemen pertanian, pernah saya baca bukunya, dia yang mengeluarkan itu ijin memperkerjakan warga negara, kalau kitakan kayak IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) dia ada disana.

2. Sulitnya mencari pekerjaan di daerah karena harus menyiapkan uang yang banyak untuk mendapatkan pekerjaan menjadi faktor penyebab mengapa para nelayan tersebut lebih memilih bekerja di Malaysia. Menurut La Moane, Tokoh Masyarakat Nelayan Wakatobi melalui komunikasi personal (Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2016) ia mengatakan :

Karena sekarang mau masuk kerja kan harus ada duit, jadi mau

tidak mau, karena mungkin orang tua tidak mampu dia lari ke Malaysia, kemana saja cari kerjaan. Karena ada permainan pak, penyuaapan pekerjaan ada karena itu. Apalagi mau sekarang pak, mau cari kepegawaian harus banyak uang kalau tidak susah juga, di Sulawesi Tenggara sudah begitu. Yang buta-butu huruf kesanalah.

3. Melihat banyaknya teman/tetangga/saudara yang sudah berhasil bekerja di Malaysia karena penghasilan disana lebih besar (sekitar tiga sampai lima juta seminggu) walaupun harus dengan cara ilegal. Menurut La Idi, ABK Kapal Ikan Malaysia asal Wakatobi melalui komunikasi personal (Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 25 Desember 2016) ia berpendapat, “Kalau disini kan biasa kerjanya setengah mati juga toh, terpaksa kita dengar dari tetangga hasilnya bagus toh, terpaksa saya turun kesana.” Sedangkan menurut Seivo Grevo Wewengkang, Pejabat Pengawas Perikanan PPNS PSDKP Batam melalui komunikasi personal (Batam-Kepulauan Riau, 19 Desember 2016) ia berpendapat, “Dia bilang dia satu minggu berlayar kalau secara ekonomi itu bisa didapat sekitar 3 juta

sampai 5 juta, itu seminggu saja. itukan beda jauh sekali kalau dengan dia bekerja dengan Indonesia.”

4. Tidak adanya atau sulitnya mencari kerja di kapal ikan berukuran besar (diatas 30 GT) milik pemerintah daerah atau pengusaha atau perusahaan perikanan setempat untuk mereka menangkap ikan di tengah laut dalam. Menurut La Dibi, ABK Kapal Ikan Malaysia asal Wakatobi melalui komunikasi personal (Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 25 Desember 2016) ia mengatakan, “Di Wakatobi ini hanya nelayan kecil-kecil saja, artinya siapkan kapal supaya menjadi nelayan besar. Sampai sekarang hanya pakai kapal ketinting hanya sampai tepi laut saja sudah pulang.”
5. Kurangnya pengawasan terhadap kapal ikan tradisional baik berbendera Indonesia ataupun berbendera Malaysia yang melakukan transit ABK saat berpapasan di laut. Berdasarkan pendapat Seivo Grevo Wewengkang, Pejabat Pengawas Perikanan PPNS PSDKP Batam melalui komunikasi personal (Batam-Kepulauan Riau, 19 Desember 2016) ia menyampaikan, “Kalau ada yang pernah orang cerita kapal nelayan

Malaysia itu sama kapal nelayan Indonesia papasan, disitu dia pindah orang.”

Setelah para WNI tersebut mendapatkan pekerjaan sebagai ABK di kapal ikan Malaysia, mereka dituntut untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak bahkan mereka juga memasuki Perairan negara tetangga Malaysia diantaranya Brunei Darussalam, Filipina dan Indonesia seperti yang dikatakan La Asiri, ABK Kapal Ikan Malaysia asal Wakatobi melalui komunikasi personal (Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 25 Desember 2016) ia mengatakan, “Terpaksa karena kalau gak ada hasil si Toke itu bising kan, marah-marah.”

Menurut Menteri KKP Susi Pujiastuti, penangkapan ikan di negara tetangga dilakukan karena jumlah kapal ikan milik pengusaha sangat banyak daripada luas wilayah Perairannya itu sendiri.¹² Ditambah lagi dengan pernyataan Pejabat Pengawas Perikanan PPNS PSDKP Batam, Seivo Grevo Wewengkang melalui komunikasi personal (Batam-Kepulauan Riau, 19

¹² Investor Daily Indonesia, (2016 Desember 9). *Empat Bulan RI Tangkap 122 Kapal Ikan Asing*. <http://id.beritasatu.com/agribusiness/empat-bulan-ri-tangkap-122-kapal-ikan-asing/153892>, diakses pada 24 Maret 2017.

Desember 2016) ia mengatakan, “Karena dia ditangkap disini (perairan Indonesia) tapi secara pengakuan dia kenapa dia tidak menangkap di Malaysia, karena di Indonesiannya banyak ikan, menyesal karena masuk Indonesia banyak ikan.”

Dari sepuluh negara yang berbatasan maritim dengan Indonesia, Malaysia adalah yang memiliki batas terpanjang dengan Indonesia dan beberapa wilayahnya sampai saat ini masih disengketakan. Selat Malaka sampai saat ini di klaim Malaysia memiliki batas wilayah ZEE sekaligus juga batas landas kontinen (*single maritime boundaries*), hal tersebut telah melanggar prinsip dan ketentuan dalam Konvensi UNCLOS 1982. Menurut Yusril Ihza Mahendra (sebagaimana dikutip dalam Shoffan Maulana, 2013) ketentuan pada perjanjian landas kontinen dengan Malaysia pada 27 Oktober 1969 bangsa Indonesia dirugikan baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Selain Selat Malaka, Perairan Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi terletak di selat Makassar sejak tahun 1979 Malaysia sudah mengincarnya dengan memasukkan pulau Sipadan dan

Ligitan dalam peta negaranya.¹³ Akibatnya Ambalat pun di klaim menjadi milik Malaysia. Akibat ketidakjelasan tersebut terkadang para nelayan kedua negara menjadi bingung dan terkadang tidak mengetahui kalau sudah memasuki daerah yang di sengkatakan.

Sedangkan berdasarkan data yang didapat dari wawancara ABK kapal ikan Malaysia bahwa baik di Malaysia bagian Barat ataupun Timur tumbuh subur kampung-kampung nelayan berdekatan dengan daerah yang sedang disengketakan oleh Indonesia dan Malaysia. Kampung-kampung nelayan tersebut pun dihuni oleh mayoritas nelayan Indonesia yang masuk menggunakan visa wisata atau turis atau bahkan sudah ada yang memiliki kartu identitas warga negara Malaysia yang disebut IC. Warga negara Indonesia yang memiliki kartu identitas ganda tersebut mayoritas berasal dari suku Bugis-Sulawesi Selatan sedangkan berdasarkan komunikasi personal dengan salah satu ABK Kapal Ikan Malaysia asal Wakatobi, Ardi (Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2016) ia mengatakan, “Kebanyakan disana yang

¹³ CNN Indonesia, (2015 Juni 17). *Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat*. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat/>, diakses pada 29 Maret 2017.

jadi kapten kapal orang Indonesia kalau saya, saya taruh 95%, iya karena disana pak, yang lain itu hanya Filipina saja, kalau Cina-Cina jarang itupun Cina Batam, masih Indonesia juga, paling banyak Bugis.”

Adapun kampung-kampung nelayan yang dihuni mayoritas warga negara Indonesia terbagi menjadi dua wilayah : Pertama, Malaysia bagian barat terbagi dua kampung nelayan Indonesia di Endau-Johor Utara, Johor Selatan dan Selangor-Kuala Lumpur dengan mayoritas penghuninya berasal dari Tanjung Balai Asahan, Kepulauan Riau, Bugis, Buton dan Wakatobi.

Kedua, Malaysia bagian timur terbagi menjadi tiga kampung nelayan Indonesia yakni di Miri-Sarawak, Sandakan-Sabah dan Tawau-Sabah dengan mayoritas penghuninya berasal dari Kalimantan Barat, Bugis, Buton dan Wakatobi.

Dari beberapa daerah potensi berkumpulnya WNI yang membentuk perkampungan di Malaysia bagian barat dan timur dan beberapa informasi yang didapat baik berasal dari ABK yang pernah melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Indonesia maupun informasi yang berasal dari aparat penegak hukum, maka daerah Perairan Indonesia yang memiliki potensi

terjadinya *illegal fishing* oleh kapal ikan berbendera Malaysia dengan menggunakan ABK asal Indonesia yakni mayoritas disekitar perbatasan maritim yang saat ini masih disengketakan oleh Indonesia dan Malaysia, yakni Selat Malaka dan Perairan Ambalat.

Masuknya kapal-kapal ikan berbendera Malaysia ke Indonesia pun memiliki beberapa sebab yang dihimpun dari beberapa narasumber yakni sebagai berikut :

1. Atas perintah Toke atau pemilik kapal dan atas perintah Nakhoda atau Kapten Kapal sehingga terkadang ABK terpaksa melakukan dan tidak mengetahui kalau kapal sudah melintasi batas dan masuk ke Perairan Indonesia, biasa dilakukan di siang dan malam hari. Seperti yang dikatakan La Idi, ABK Kapal Ikan Malaysia asal Wakatobi melalui komunikasi personal (Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 25 Desember 2016) ia berkata, “Ya gelap-gelap, kalau siang tidak bisa. Waktu itu Tekong saya tidur, terpaksa waktu itu saya yang pegang stir karena dia tidur. Setelah sampai line base saya bangun. Lampu kasih mati. Terpaksa itu 3 jam putar-putar situ;”

2. Terbawa arus dasar laut yang kuat saat jaring masih di bawah laut dan posisi kapal saat itu sudah di perbatasan Indonesia-Malaysia. Aktifitas tidak terlalu lama kurang lebih tiga jam karena takut tertangkap oleh aparat maritim Indonesia (La Asiri, ABK Kapal Ikan Malaysia asal Wakatobi, Komunikasi Personal, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 25 Desember 2016);
3. Adanya keinginan coba-coba dari Nakhoda dan ABK dengan melintasi jalur dekat perbatasan disaat malam hari dengan mematikan lampu kapal dan melempar jaring. Seperti yang diungkapkan Ardi, ABK Kapal Ikan Malaysia asal Wakatobi, melalui komunikasi personal (Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2016) ia mengatakan, “Kebanyakan mereka itukan cari-cari waktu, cari kesempatan kapan tidak ada maritim disana mereka masuk. Kebanyakan mereka itukan dekat perbatasan saja itu, dekat perbatasan, kapan mereka rasa aman mereka masuk sebentar keluar lagi, begitu semua begitu.”

Karena cuaca buruk saat di perbatasan dan kehilangan arah. Aktifitas dilakukan semalaman selama seminggu di tengah laut (La Arifin, ABK Kapal Ikan

Malaysia asal Wakatobi, Komunikasi Personal, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2016).

Saat ini keamanan maritim memiliki kajian atau cakupan yang sangat luas meliputi persoalan atau permasalahan-permasalahan non tradisional seperti terorisme, pembajakan, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba ilegal dan *illegal unreported unregulated fishing* (Sam Bateman, 2010, p. 6). Permasalahan non tradisional ini merupakan kejahatan keamanan yang perlu diantisipasi agar tidak meluas menjadi permasalahan yang dapat mengganggu hubungan bilateral dan kawasan sekitarnya. Penelitian ini mengambil permasalahan *illegal fishing* yang dipengaruhi rendahnya pengetahuan nasionalisme para pelaku, hanya saja pelaku ini adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal ikan berbendera Malaysia.

Bagi nelayan yang memilih bekerja di Malaysia pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dikarenakan sulitnya mencari kerja di daerah asal berdasarkan keahlian yang mereka miliki. Keahlian mereka adalah menjadi ABK kapal ikan yang memiliki besar diatas 30 GT atau kapal ikan besar dengan alat tangkap modern. Jenis kapal dan alat tangkap seperti ini dibebepara

daerah jarang ada karena kurangnya minat pengusaha untuk berinvestasi di usaha penangkapan ikan. Kalaupun ada itu tidak sebanding dengan jumlah nelayan yang sangat banyak yakni 2,17 juta pada tahun 2016.

Hal berbeda yang terjadi di negara Malaysia, disana lapangan pekerjaan sebagai ABK kapal ikan sangat terbuka lebar bahkan tidak perlu seleksi, cukup menggunakan paspor saja sudah langsung diterima oleh si pengusaha, bahkan di beberapa kasus ditemui ABK yang tidak memiliki paspor bekerja sebagai ABK kapal ikan berbendera Malaysia. Terlebih lagi Tekong atau pemilik kapal yang melindungi para nelayan ilegal tersebut dari petugas Perikanan dan petugas Imigrasi Malaysia dengan memberikan sejumlah uang agar dapat melaut.

Fakta-fakta diatas menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah Malaysia membiarkan masuknya para pencari kerja asing yang berprofesi sebagai ABK di kapal ikannya. Dari beberapa narasumber mengatakan bahwa saat ini warga negara Malaysia sudah jarang yang berprofesi sebagai ABK kapal ikan dan diperkirakan sekitar 70 persen adalah warga negara Indonesia. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini

dapat menyebabkan kelangkaan WNI yang berprofesi sebagai nelayan di negara Indonesia itu sendiri.

Pengaruh lainnya seperti melihat banyaknya teman/tetangga/saudara mereka yang sudah berhasil bekerja di Malaysia, dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka yakni mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga sekolah menengah atas, mampu membangun rumah, mampu membeli kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Pengaruh lingkungan sangat besar dalam merubah sudut pandang mereka sehingga mereka semakin bertekad untuk bekerja di negara lain daripada di negara sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat George Harbert Mead¹⁴ yang mengatakan bahwa isyarat non verbal seperti status, kepemilikan harta dan lain-lain akan mempengaruhi pikiran seseorang. Sedangkan menurut Herbert Blumer¹⁵ bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka.

Sedangkan adanya sindikat pencari kerja ilegal yang terkadang masih kerabat

¹⁴ Siregar, N.S. Salmaniah. (2011). *Kajian tentang Interaksionalisme Simbolik*. Jurnal Ilmu Sosial-Universitas Medan Area. ISSN: 2085-0328. hlm. 101.

¹⁵ West, Richard & Turner, Lynn H. (2010). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. McGraw-Hill Higher Education. New York-United States of America. hlm. 80.

para ABK semakin meyakinkan mereka bahwa bekerja secara ilegal di Malaysia adalah kegiatan yang aman-aman saja tanpa berfikir bahaya yang dihadapinya di kemudian hari. Interaksi ini terjadi disebabkan adanya komunikasi yang terus-menerus baik dari si pencari kerja maupun dari sindikat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Herbert Blumer¹⁶ bahwa individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain dan konsep diri membentuk motif yang penting untuk perilaku.

Perlunya pencegahan perilaku keluar masuknya WNI dari dan ke Malaysia sebaiknya segera dilakukan dengan program-program yang persuasif dan memberikan kesadaran akan cinta tanah air sehingga mereka tidak merasa dipaksa dan menjadi enggan bekerja di luar negeri. Hal ini sangat diperlukan karena berdasarkan wawancara peneliti kepada beberapa ABK yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia rata-rata mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 82

konsep nasionalisme dari Modul Bela Negara-Universitas Pertahanan¹⁷ bahwa untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, kecintaan kepada tanah air dapat ditumbuhkan melalui mengenal dan memahami wilayah nusantara dengan baik setiap posisi, morfologi serta kekayaan yang terkandung didalamnya.

Kurangnya pengetahuan ABK tersebut akan Wawasan Nusantara dikarenakan sikap yang tidak peduli dan kekecewaan mereka terhadap pemerintah Indonesia hal ini sejalan dengan Halkis ideologi Pancasila hanya baru dilihat sebagai teks yang harus dimaknai belum pada praktiknya. Ketidakpedulian dan kekecewaan tersebut membuatnya melakukan pelanggaran *illegal fishing* di negaranya sendiri tanpa merasa bersalah, hal ini sangat bertolak belakang dengan Indikator Nilai Bela Negara Ditjen Potan Kemhan yakni indikator cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks ini ada seluruh wilayah Indonesia yang meliputi tanah, air dan udara.

¹⁷ Modul 4. (2015). *Pembinaan Kesadaran Bela Negara*. Fakultas Strategi Pertahanan-Universitas Pertahanan, hlm. 28.

Kurangnya pengetahuan dasar juga turut andil dalam pelanggaran yang mereka lakukan seperti pengetahuan akan nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Hal diatas juga berkontradiksi dengan Indikator Nilai Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan¹⁸ yakni indikator memiliki kemampuan awal bela negara yang ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi. Dalam hal ini kecerdasan intelegensi pada ABK masih perlu diperdalam terutama mengenai nilai-nilai bela negara yang merupakan dasar dari sikap nasionalisme.

Walaupun mereka para ABK yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di negaranya sendiri masih kurang dalam pengetahuan nasionalisme, tetapi mereka masih memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dibuktikan dengan masih bangganya mereka menggunakan bahasa dan produk produksi Indonesia, masih pedulinya mereka untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar bersama-sama masyarakat lainnya, menjaga perairan mereka dari pencurian kapal ikan asing dan merasa tidak terima bila melihat

negara dan bangsanya dihina oleh bangsa lain serta siap membela negaranya untuk berperang bila dibutuhkan. Untuk hal diatas sudah sejalan dengan Indikator Bela Negara yang dikeluarkan Ditjen Pothan Kemhan, hanya saja para ABK tersebut baru melaksanakannya setengah-setengah, seperti mereka menjaga pekarangannya tetapi tidak menjaga seluruh wilayah perairan Indonesia dengan melakukan penangkapan ikan secara ilegal untuk negara Malaysia, lalu mereka bangga dengan Indonesia dan siap membela negara bila dibutuhkan tetapi mereka tetap melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dapat dikatakan sikap mereka dalam mencintai negaranya masih berdasarkan memenuhi kepentingannya saja. Kepentingan ini dapat dikatakan sebagai sikap politis warga kepada negaranya. Hal yang sejalan dengan pendapat Benedict Anderson (2006, p. 6) bahwa nasionalisme adalah sebuah komunitas politis dan dibayangkan dibatasi oleh hubungan yang erat dan memiliki kedaulatan.

Saat peneliti menjelaskan bahwa seharusnya ada kebanggaan dari para ABK terhadap Negara Kesatuan Republik

¹⁸ Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. (2014). *Tataran Dasar Bela Negara*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. hlm. 38.

Indonesia yang selama ini sering dianggap hal yang biasa, yakni situasi aman dan damai saat melakukan aktifitas apapun di Indonesia. Hal ini tentu sangat berbeda dirasakan bila kita berada di negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika. Maka saat itulah mereka seperti terserahkan dan menyadari bahwa mereka kurang bersyukur akan nikmat yang Tuhan telah berikan bahwa negaranya telah memberikan banyak manfaat bagi mereka yang sulit ditemui di negara lain. Seperti yang dikatakan salah satu ABK La Idi (Komunikasi Personal, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 25 Desember 2016) bahwa daripada hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Hal ini sejalan dengan Indikator Nilai Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan¹⁹ yakni senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Republik Indonesia melalui aparat penegak hukumnya memiliki kewajiban menjaga keamanan warga negaranya dari ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar. Hal ini dilakukan negara semata-mata untuk menjaga kualitas hubungan dengan rakyatnya karena rakyat merupakan salah satu unsur mutlak dari suatu negara. Pendapat Barry

¹⁹ *Ibid*, hlm. 39.

Buzan²⁰ juga membenarkan hal tersebut yakni keamanan individu dan masyarakat merupakan bagian dari suatu negara dalam mempertahankan kualitas hubungannya dan sejauhmana negara dapat melindungi mereka dari ancaman luar.

Yang menarik dari penelitian ini adalah pernyataan penyesalan dari para ABK yang pernah melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan Indonesia menggunakan kapal ikan berbendera Malaysia. Mereka mulai memahami pentingnya pengetahuan akan Wawasan Nusantara dan Nasionalisme yang ternyata dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari mereka baik saat berada di Indonesia maupun saat berada di Malaysia. Bahkan diakhir wawancara semua ABK merasa menyesal seperti yang diungkapkan Ardi (Wakatobi-Sulawesi Tenggara, 25 Desember 2016) ia mengatakan, “Menyesal sekali, karena merugikan negara. Sebenarnya sejak itu hari saya berhenti, takut. Tidak enak juga kita kerja sama Malaysia curi ikan di Indonesia padahal kita orang Indonesia.”

²⁰ Rahman, Chris. (2009). *Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand*. Pusat Kajian Strategis. Universitas Victoria Wellington-New Zealand. hlm. 6.

Kehadiran peneliti sebagai orang asing ke daerah mereka dengan memberikan pengetahuan bela negara cukup membuat mereka efek positif dan diharapkan akan ditularkan kepada kerabat-kerabat mereka yang masih melakukan *illegal fishing*. Kondisi ini sesuai dengan asumsi lingkungan sekitar seperti kerabat, keluarga, kenalan, orang terkasih, guru bahkan orang asing pun dapat berpengaruh terhadap pengembangan diri.²¹

Berdasarkan tugasnya PSDKP masih setengah-setengah melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan fungsinya sebagai yang menangani tindak pidana kelautan dan perikanan karena hanya memberikan peringatan lalu dilepaskan kepada ABK yang berkewarganegaraan Indonesia sedangkan perlakuan yang berbeda terhadap Nakhoda kapal. Nakhoda kapal dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangan tentang perikanan. Pembinaan yang diberikan PSDKP terhadap ABK dirasakan masih sangat kurang memberikan efek jera dan masih memerlukan pembenahan kembali dalam hal penanaman wawasan kebangsaan, hal ini sejalan dengan M.

Halkis²² bahwa hegemoni kekuasaan yang dilakukan Aparatur Negara Represif dapat membentuk ideologi negara, maka seharusnya pembinaan mengenai wawasan kebangsaan seperti pemahaman terhadap Pancasila dan bagaimana pratiknya sudah seharusnya diberikan secara mendalam oleh PSDKP.

Mengingat pentingnya penanaman wawasan kebangsaan kepada para nelayan yang bekerja sebagai ABK di kapal ikan berbendera Malaysia karena berdasarkan penyelidikan PSDKP Batam dan beberapa ABK kapal ikan Malaysia asal Wakatobi bahwa perbandingan WNI dengan warga negara Malaysia yang berprofesi di kapal ikan adalah 70 banding 30 persen. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena alasan tuntutan ekonomi para ABK ini rela mencuri ikan di negaranya sendiri dan memberikan hasil tangkapannya untuk bangsa asing. Kegiatan ini pun sering dilakukan di daerah-daerah yang masih disengketakan antara Indonesia dengan Malaysia, seperti di Selat Malaka dan Perairan Ambalat, sehingga dapat memicu perselisihan antar penegak hukum kedua negara. Keadaan tersebut bukan tidak

²¹ West, Richard & Turner, Lynn H., *Op.Cit*, hlm. 83.

²² Halkis, M. (2016). *Gedabu: Termometer Paradigma Berfikir dan Bela Negara*. Universitas Pertahanan-Bogor. hlm. 138.

mungkin merubah permasalahan keamanan menjadi permasalahan pertahanan. Kondisi ini sesuai dengan teori Dimensi Keamanan milik Barry Buzan²³ menyatakan bahwa kondisi ekonomi dari warga negara terhadap eksistensi suatu negara dapat berimplikasi pada keamanan internasional yang melintasi batas-batas negara sehingga dapat menyebabkan konflik antar negara. Dan ini sangat berseberangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga Negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Profesi sebagai ABK kapal ikan sangat tumbuh subur di Malaysia bahkan sudah membentuk perkampungan-perkampungan nelayan asal Indonesia karena kurangnya pengawasan oleh aparat Imigrasi dan aparat Maritim Malaysia. Hal tersebut seperti pembiaran yang terus-menerus karena profesi nelayan merupakan profesi yang kurang menarik bagi warga negara Malaysia itu sendiri. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan perikanan para pengusaha perikanan atau pemilik kapal merekrut para pencari kerja hingga ke Indonesia dengan menggunakan sanak *family* yang

sudah bekerja di kapal ikan mereka. Para pengusaha dan pemilik kapal ini membantu biaya pengurusan paspor, pengurusan visa, pengurusan ijin perikanan, melindungi para ABK dari aparat Imigrasi dan aparat maritim Malaysia dengan memberikan uang tebusan. Kondisi tersebut sangat berbahaya bila dibiarkan terus terjadi sehingga dapat mengancam keamanan maritim Indonesia karena kejahatan ini sudah terorganisir dilakukan lintas negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Octavian & Yulianto²⁴ bahwa kejahatan terorganisasi lintas negara adalah tantangan dalam dunia keamanan maritim sehingga perlu pendekatan yang lebih efektif untuk menangani ancaman maritim jenis baru ini.

Mengenai fenomena tersebut baik KKP Pusat, PSDKP dan Dinas Kelautan Perikanan di daerah belum melakukan kajian resmi untuk mengatasi maraknya kapal ikan berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan Indonesia menggunakan ABK asal Indonesia, saat ini baru sekedar laporan-laporan resmi saja dari petugas pengawas perikanan kepada satuan

²³ Rahman, Chris., *Op. Cit.*, hlm. 8.

²⁴ Octavian, Amarulla & Yulianto, Bayu A. (2014). *Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim*. Universitas Pertahanan Indonesia-Jakarta. hlm. 29.

ditingkat atas sehingga penanganan permasalahan nasionalisme ABK tersebut belumlah maksimal ditahap pembinaannya. Perlakuan terhadap ABK pelaku *illegal fishing* saat ini masih bersifat pembinaan belum penahanan, sedangkan amanat Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 yang dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membawa, menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan mengoperasikan kapal ikan asing tanpa surat ijin akan dipidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah.

Antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencegah warga negaranya bekerja di luar negeri dan mencintai negaranya sendiri dengan memberikan bantuan berupa berbagai sarana penangkapan mencari ikan seperti kapal dan alat tangkapnya serta bantuan perlengkapan budidaya apung sejalan dengan pendapat Benedict Anderson²⁵ yang menyatakan bahwa proses kesadaran nasional muncul melalui bantuan kapitalisme. Bantuan tersebut diharapkan dapat mensejahterakan para nelayan yang

selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah.

Beberapa kebijakan dan program sudah dikeluarkan KKP yang dibantu oleh Dinas Kelautan Perikanan setiap provinsi untuk mengelola laut dan meminimalisir *illegal fishing* yang terjadi, sehingga para nelayan lokal diharapkan tidak lagi bekerja di kapal ikan asing. Adapun kebijakan dan program tersebut yakni : Program Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, Bantuan Perlengkapan Budidaya Apung, Sosialisasi Pemanfaatan Daerah Pesisir dan Pembinaan Pengoperasian Alat Tangkap Ramah Lingkungan serta koordinasi yang intensif dengan Konjen-Konjen RI di Malaysia terkait pengawasan ABK Indonesia di kapal ikan. Peran pemerintah senada dengan pendapat Geoffrey Till²⁶ yang mengasumsikan kerangka dasar tata kelola laut melibatkan tiga unsur, kesadaran maritim, kebijakan yang efektif dan tata kelola yang terpadu atau terintegrasi.

Tindakan positif pemerintah baik pusat dan daerah dengan memberikan bantuan-bantuan yang bersifat mensejahterakan nelayan ini, sejalan dengan pernyataan Barry Buzan,²⁷ ia

²⁵ Hendrastomo, Grendi. (2007). *Nasionalisme VS Globalisasi 'Hilangnya' Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern*. Dimensiana, Volume I Nomor 1. hlm. 4.

²⁶ Till, Geoffrey. (2009). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. Routledge, New York-2nd ed. hlm. 306-307.

²⁷ Rahman, Chris., *Op. Cit*, hlm. 6.

Menyatakan demi keamanan individu dan masyarakat negara dapat mengambil tindakan positif, netral ataupun negatif. Namun bantuan-bantuan tersebut perlu diselingi dengan sosialisasi program-program bela negara yang membekali pengetahuan dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan di kalangan nelayan agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh.

Kesimpulan

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan adalah permasalahan para ABK yang pernah melakukan penangkapan ikan secara ilegal, sehingga menyebabkan mereka melakukan pencurian ikan di negaranya sendiri. Namun para ABK tersebut tidak serta-merta kehilangan semangat nasionalismenya yang dipraktikkannya dengan turut aktif bergotong-royong disetiap Peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 1945, turut aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, masih bangganya mereka menggunakan bahasa Indonesia di negara asing, bangga menggunakan produk-produk buatan Indonesia bahkan mereka siap membela negaranya bila dibutuhkan untuk berperang. Hal tersebut sejalan dengan

Ritter (Adisusilo, 2012, p. 4) bahwa nasionalisme bermula dari rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa dan daerah asal usul semula, rasa cinta yang disebut semangat patriotisme.

Peran pemerintah masih kurang maksimal dalam mengatasi maraknya ABK Indonesia di kapal ikan Malaysia yang menangkap ikan secara ilegal di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan belum diterapkan sanksi pidana dan perdata kepada para ABK berdasarkan peraturan perundangan tentang perikanan sehingga belum dapat memberikan efek jera serta minimnya pembinaan dalam penanaman Wawasan Kebangsaan. Ditambah lagi dengan kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Daerah yang masih kurang menyentuh penanaman tentang Wawasan Kebangsaan bagi para nelayan.

Untuk meminimalisir fenomena maraknya ABK WNI di kapal ikan berbendera Malaysia yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia sebaiknya pemerintah dalam hal ini KKP dan Dinas Kelautan Perikanan serta Akademisi segera merumuskan kebijakan dan program yang bermuatan Bela Negara seperti sosialisasi pengetahuan dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan kepada para nelayan,

terutama nelayan yang berada di daerah perbatasan seperti di daerah Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat ditambah juga dengan daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Hal tersebut sangat dibutuhkan mereka karena rata-rata latar belakang pendidikan mereka yang rendah.

Selanjutnya pemerintah dalam hal ini KKP dan Dinas Kelautan Perikanan di daerah sebaiknya dapat bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha agar ingin berinvestasi di bidang perikanan tangkap. Tujuannya adalah untuk menampung nelayan-nelayan yang memiliki keterampilan menangkap ikan dengan kapal ikan besar dan alat modern serta tidak terafiliasi dalam KUB/Kelompok Koperasi dengan membuat kapal ikan berukuran diatas 30 GT.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, John W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar-Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. (2014). *Tataran Dasar Bela Negara*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Halkis, M. (2016). *Gedabu: Termometer Paradigma Berfikir dan Bela Negara*. Universitas Pertahanan-Bogor.

Modul 4. (2015). *Pembinaan Kesadaran Bela Negara*. Fakultas Strategi Pertahanan-Universitas Pertahanan.

Octavian, Amarulla & Yulianto, Bayu A. (2014). *Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim*. Universitas Pertahanan Indonesia-Jakarta.

Rahman, Chris. (2009). *Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand*. Pusat Kajian Strategis. Universitas Victoria Wellington-New Zealand.

Till, Geoffrey. (2009). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. Routledge, New York-2nd ed.

West, Richard & Turner, Lynn H. (2010). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. McGraw-Hill Higher Education. New York-United States of America.

Jurnal

- Adisusilo, Sutarjo. (2010). *Nasionalisme Demokrasi Civil Society*. Universitas Sanata Dharma-Yogyakarta.
- Hendrastomo, Grendi. (2007). *Nasionalisme VS Globalisasi 'Hilangnya' Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern*. Dimensiana, Volume I Nomor 1.
- Lewerissa, Yanti A. (2010). *Praktek Illegal Fishing di Perairan Mlaku sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Sasi Volume 16 Nomor 3.
- Siregar, N.S. Salmaniah. (2011). *Kajian tentang Interaksionalisme Simbolik*. Jurnal Ilmu Sosial-Universitas Medan Area. ISSN: 2085-0328.

Tesis

Ikhtiar, Richarunia W. (2011). *Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010*. Jakarta. Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Berita Elektronik

CNN Indonesia. (2015 Juni 17). *Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat*.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat/>, diakses pada 29 Maret 2017.

Investor Daily Indonesia. (2016 Desember 9). *Empat Bulan RI Tangkap 122 Kapal Ikan Asing*.

<http://id.beritasatu.com/agribisnis/empat-bulan-ri-tangkap-122-kapal-ikan-asing/153892>, diakses pada 24 Maret 2017.

Kompas. (2016 September 20). *Kapal Ikan Malaysia Ditangkap di Perairan Tanjung Datuk*.

<http://regional.kompas.com/read/2016/09/20/15152481/kapal.ikan.malaysia.ditangkap.di.Perairan.tanjung.datuk>, diakses pada 23 Maret 2017.

Liputan 6 News. (2015 Juli 7). *TNI AL Tangkap Kapal Ikan Malaysia di Wilayah Sengketa Ambalat*.

<http://news.liputan6.com/read/2267926/tni-al-tangkap-kapal-ikan-malaysia-di-wilayah-sengketa-ambalat>, diakses pada 14 Desember 2015.

Liputan 6 Bisnis. (2015 Nopember 30). *50% ABK RI Bekerja Secara Ilegal di Kapal*

Asing.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2378160/50-abk-ri-bekerja-secara-ilegal-di-kapal-asing>, diakses pada 27 Desember 2015.

Sindonews. (2015 Desember 22).

Pekerjakan ABK Indonesia 4 Kapal Malaysia Mencuri Ikan di Malaka.

<http://daerah.sindonews.com/read/1071556/194/pekerjaan-abk-indonesia-4-kapal-malaysia-mencuri-ikan-di-malaka-1450783298>, diakses pada 27 Desember 2015.

Makalah/Artikel/Presentasi/Dokumen

Dahuri, Rokhmin (2014). *Membangun Indonesia sebagai Negara Maritim yang Maju, Adil-Makmur, Kuat dan Berdaulat*. Disampaikan dalam Seminar Kebangsaan “Laut Sumber Kemakmuran dan Kedaulatan Bangsa” 1 Oktober 2014-Jakarta.

PSDKP Batam. (2016). *Data Tindak Pidana Perikanan Tahun 2016 Di Satker PSDKP Batam*.